



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 224 /PMK.07/2009

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tatacara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Kas Umum Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

Memperhatikan : 1. Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Agustus sampai dengan tanggal 17 September 2009;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2466 K/80/MEM/2009 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum untuk masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah merupakan perkiraan.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari penerimaan Iuran Tetap dan Royalty.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun berdasarkan perkiraan penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar Rp6.585.296.664.300,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Iuran Tetap sebesar Rp94.066.885.900,00 (sembilan puluh empat miliar enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - b. Royalty sebesar Rp6.491.229.778.400,00 (enam triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dilaksanakan secara triwulanan.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Triwulan I dan Triwulan II masing-masing dilaksanakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diperhitungkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Triwulan III dan Triwulan IV.
- (4) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dengan daerah penghasil.
- (5) Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atas perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dalam satu Tahun Anggaran dan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mencukupi kebutuhan atau realisasi melebihi pagu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran berjalan, maka dapat dilakukan penyaluran sesuai realisasi penerimaan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 502

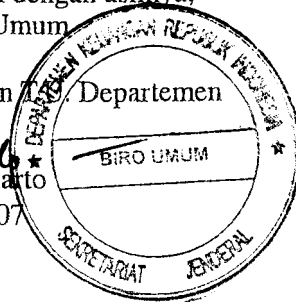
Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian  Departemen

Antonius Siharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 224/PMK.07/2009 TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2010

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2010

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1.066.926.700,00	-	1.066.926.700,00
1	Kab. Aceh Barat	30.567.600,00	-	30.567.600,00
2	Kab. Aceh Besar	63.962.800,00	-	63.962.800,00
3	Kab. Aceh Selatan	31.104.000,00	-	31.104.000,00
4	Kab. Aceh Singkil	40.961.900,00	-	40.961.900,00
5	Kab. Aceh Tengah	465.920.000,00	-	465.920.000,00
6	Kab. Aceh Tenggara	-	-	-
7	Kab. Aceh Timur	38.400.000,00	-	38.400.000,00
8	Kab. Aceh Utara	-	-	-
9	Kab. Bireun	-	-	-
10	Kab. Pidie	89.934.400,00	-	89.934.400,00
11	Kab. Simeulue	-	-	-
12	Kota Banda Aceh	-	-	-
13	Kota Sabang	-	-	-
14	Kota Langsa	-	-	-
15	Kota Lhokseumawe	-	-	-
16	Kab. Nagan Raya	15.888.000,00	-	15.888.000,00
17	Kab. Aceh Jaya	10.875.400,00	-	10.875.400,00
18	Kab. Aceh Barat Daya	45.473.500,00	-	45.473.500,00
19	Kab. Gayo Lues	-	-	-
20	Kab. Aceh Tamiang	18.232.300,00	-	18.232.300,00
21	Kab. Bener Meriah	-	-	-
22	Kab. Pidie Jaya	-	-	-
23	Kota Subulussalam	2.221.400,00	-	2.221.400,00
24	Bagian Provinsi	213.385.400,00	-	213.385.400,00
	Provinsi Sumatera Utara	1.698.078.700,00	-	1.698.078.700,00
1	Kab. Asahan	-	-	-
2	Kab. Dairi	120.697.600,00	-	120.697.600,00
3	Kab. Deli Serdang	-	-	-
4	Kab. Tanah Karo	-	-	-
5	Kab. Labuhanbatu	-	-	-
6	Kab. Langkat	-	-	-
7	Kab. Mandailing Natal	497.128.300,00	-	497.128.300,00
8	Kab. Nias	5.257.600,00	-	5.257.600,00
9	Kab. Simalungun	-	-	-
10	Kab. Tapanuli Selatan	349.801.600,00	-	349.801.600,00
11	Kab. Tapanuli Tengah	200.273.900,00	-	200.273.900,00
12	Kab. Tapanuli Utara	76.032.000,00	-	76.032.000,00
13	Kab. Toba Samosir	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Kota Binjai	-	-	-
15	Kota Medan	-	-	-
16	Kota Pematang Siantar	-	-	-
17	Kota Sibolga	-	-	-
18	Kota Tanjung Balai	-	-	-
19	Kota Tebing Tinggi	-	-	-
20	Kota Padang Sidempuan	63.520.000,00	-	63.520.000,00
21	Kab. Pakpak Bharat	31.340.800,00	-	31.340.800,00
22	Kab. Nias Selatan	-	-	-
23	Kab. Humbang Hasundutan	14.411.200,00	-	14.411.200,00
24	Kab. Serdang Berdagai	-	-	-
25	Kab. Samosir	-	-	-
26	Kab. Batu Bara	-	-	-
27	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	-
28	Kab. Padang Lawas	-	-	-
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	-	-
30	Kab. Labuhanbatu Utara	-	-	-
31	Kab. Nias Utara	-	-	-
32	Kab. Nias Barat	-	-	-
33	Kota Gunungsitoli	-	-	-
34	Bagian Provinsi	339.615.700,00	-	339.615.700,00
	Provinsi Sumatera Barat	924.492.000,00	5.727.943.000,00	6.652.435.000,00
1	Kab. Limapuluh Kota	28.277.200,00	248.175.300,00	276.452.500,00
2	Kab. Agam	4.589.400,00	127.287.600,00	131.877.000,00
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	127.287.600,00	127.287.600,00
4	Kab. Padang Pariaman	-	127.287.600,00	127.287.600,00
5	Kab. Pasaman	99.231.400,00	127.287.600,00	226.519.000,00
6	Kab. Pesisir Selatan	81.168.700,00	127.287.600,00	208.456.300,00
7	Kab. Sijunjung	63.757.800,00	1.191.099.400,00	1.254.857.200,00
8	Kab. Solok	29.796.700,00	127.287.600,00	157.084.300,00
9	Kab. Tanah Datar	-	127.287.600,00	127.287.600,00
10	Kota Bukit Tinggi	-	127.287.600,00	127.287.600,00
11	Kota Padang Panjang	-	127.287.600,00	127.287.600,00
12	Kota Padang	-	127.287.600,00	127.287.600,00
13	Kota Payakumbuh	-	127.287.600,00	127.287.600,00
14	Kota Sawahlunto	404.126.000,00	997.679.100,00	1.401.805.100,00
15	Kota Solok	-	127.287.600,00	127.287.600,00
16	Kota Pariaman	-	127.287.600,00	127.287.600,00
17	Kab. Pasaman Barat	-	127.287.600,00	127.287.600,00
18	Kab. Dharmasraya	7.161.600,00	236.086.500,00	243.248.100,00
19	Kab. Solok Selatan	21.484.800,00	127.287.600,00	148.772.400,00
20	Bagian Provinsi	184.898.400,00	1.145.588.700,00	1.330.487.100,00
	Provinsi Riau	2.084.678.600,00	21.846.602.000,00	23.931.280.600,00
1	Kab. Bengkalis	79.400.300,00	794.421.900,00	873.822.200,00
2	Kab. Indragiri Hilir	127.052.100,00	1.243.872.000,00	1.370.924.100,00
3	Kab. Indragiri Hulu	893.361.600,00	6.840.477.600,00	7.733.839.200,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Kab. Kampar	264.853.400,00	794.421.900,00	1.059.275.300,00
5	Kab. Kuantan Singingi	174.899.500,00	2.103.500.000,00	2.278.399.500,00
6	Kab. Pelalawan	37.920.000,00	794.421.900,00	832.341.900,00
7	Kab. Rokan Hilir	-	794.421.900,00	794.421.900,00
8	Kab. Rokan Hulu	74.240.000,00	794.421.900,00	868.661.900,00
9	Kab. Siak	16.016.000,00	934.056.800,00	950.072.800,00
10	Kota Dumai	-	794.421.900,00	794.421.900,00
11	Kota Pekanbaru	-	794.421.900,00	794.421.900,00
12	Kab. Kepulauan Meranti	-	794.421.900,00	794.421.900,00
13	Bagian Provinsi	416.935.700,00	4.369.320.400,00	4.786.256.100,00
	Provinsi Kepulauan Riau	1.185.275.200,00	46.386.745.800,00	47.572.021.000,00
1	Kab. Bintan	189.238.000,00	7.509.758.900,00	7.698.996.900,00
2	Kab. Natuna	800.000,00	3.223.400.800,00	3.224.200.800,00
3	Kab. Karimun	293.224.400,00	9.823.336.200,00	10.116.560.600,00
4	Kota Batam	-	3.223.400.800,00	3.223.400.800,00
5	Kota Tanjung Pinang	37.851.800,00	5.479.378.700,00	5.517.230.500,00
6	Kab. Lingga	62.816.000,00	4.076.725.800,00	4.139.541.800,00
7	Kab. Kepulauan Anambas	-	3.223.400.800,00	3.223.400.800,00
8	Bagian Provinsi	601.345.000,00	9.827.343.800,00	10.428.688.800,00
	Provinsi Jambi	2.426.326.000,00	18.339.703.900,00	20.766.029.900,00
1	Kab. Batanghari	587.669.600,00	1.655.179.100,00	2.242.848.700,00
2	Kab. Bungo	176.557.400,00	5.907.415.800,00	6.083.973.200,00
3	Kab. Kerinci	-	733.588.100,00	733.588.100,00
4	Kab. Merangin	202.738.300,00	848.787.000,00	1.051.525.300,00
5	Kab. Muaro Jambi	225.888.000,00	733.588.100,00	959.476.100,00
6	Kab. Sarolangun	578.018.700,00	779.667.700,00	1.357.686.400,00
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	67.995.200,00	779.667.700,00	847.662.900,00
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	733.588.100,00	733.588.100,00
9	Kab. Tebo	102.193.600,00	1.033.105.200,00	1.135.298.800,00
10	Kota Jambi	-	733.588.100,00	733.588.100,00
11	Kota Sungai Penuh	-	733.588.100,00	733.588.100,00
12	Bagian Provinsi	485.265.200,00	3.667.940.900,00	4.153.206.100,00
	Provinsi Sumatera Selatan	6.983.719.100,00	257.136.964.200,00	264.120.683.300,00
1	Kab. Lahat	577.094.900,00	35.411.445.500,00	35.988.540.400,00
2	Kab. Musi Banyuasin	1.754.385.400,00	8.958.754.600,00	10.713.140.000,00
3	Kab. Musi Rawas	275.336.700,00	7.346.770.400,00	7.622.107.100,00
4	Kab. Muara Enim	1.361.059.500,00	73.178.126.400,00	74.539.185.900,00
5	Kab. Ogan Komering Ilir	24.192.000,00	7.346.770.400,00	7.370.962.400,00
6	Kab. Ogan Komering Ulu	844.277.400,00	7.346.770.400,00	8.191.047.800,00
7	Kota Palembang	-	7.346.770.400,00	7.346.770.400,00
8	Kota Pagar Alam	-	7.346.770.400,00	7.346.770.400,00
9	Kota Lubuk Linggau	-	7.346.770.400,00	7.346.770.400,00
10	Kota Prabumulih	82.936.300,00	7.346.770.400,00	7.429.706.700,00
11	Kab. Banyuasin	398.304.300,00	7.346.770.400,00	7.745.074.700,00
12	Kab. Ogan Ilir	-	7.346.770.400,00	7.346.770.400,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	69.664.000,00	7.346.770.400,00	7.416.434.400,00
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	199.724.800,00	7.346.770.400,00	7.546.495.200,00
15	Kab. Empat Lawang	-	7.346.770.400,00	7.346.770.400,00
16	Bagian Provinsi	1.396.743.800,00	51.427.392.900,00	52.824.136.700,00
	Provinsi Bangka Belitung	9.997.155.500,00	183.278.206.900,00	193.275.362.400,00
1	Kab. Bangka	2.290.849.400,00	32.751.679.600,00	35.042.529.000,00
2	Kab. Belitung	317.338.000,00	15.885.177.900,00	16.202.515.900,00
3	Kota Pangkal Pinang	76.768.000,00	12.218.547.100,00	12.295.315.100,00
4	Kab. Bangka Selatan	1.663.245.600,00	25.428.417.900,00	27.091.663.500,00
5	Kab. Bangka Tengah	1.206.866.800,00	22.701.777.900,00	23.908.644.700,00
6	Kab. Bangka Barat	1.394.376.000,00	21.018.461.000,00	22.412.837.000,00
7	Kab. Belitung Timur	1.048.280.600,00	16.618.504.100,00	17.666.784.700,00
8	Bagian Provinsi	1.999.431.100,00	36.655.641.400,00	38.655.072.500,00
	Provinsi Bengkulu	790.485.100,00	10.559.896.200,00	11.350.381.300,00
1	Kab. Bengkulu Selatan	12.000.000,00	469.328.700,00	481.328.700,00
2	Kab. Bengkulu Utara	316.035.500,00	2.062.202.000,00	2.378.237.500,00
3	Kab. Rejang Lebong	-	469.328.700,00	469.328.700,00
4	Kota Bengkulu	-	469.328.700,00	469.328.700,00
5	Kab. Kaur	7.286.400,00	469.328.700,00	476.615.100,00
6	Kab. Seluma	124.261.400,00	1.038.212.000,00	1.162.473.400,00
7	Kab. Mukomuko	59.822.400,00	469.328.700,00	529.151.100,00
8	Kab. Lebong	23.750.400,00	469.328.700,00	493.079.100,00
9	Kab. Kepahiang	4.992.000,00	469.328.700,00	474.320.700,00
10	Kab. Bengkulu Tengah	84.240.000,00	2.062.202.000,00	2.146.442.000,00
11	Bagian Provinsi	158.097.000,00	2.111.979.300,00	2.270.076.300,00
	Provinsi Lampung	452.429.800,00	83.998.000,00	536.427.800,00
1	Kab. Lampung Barat	28.032.000,00	2.584.500,00	30.616.500,00
2	Kab. Lampung Selatan	11.840.000,00	13.661.400,00	25.501.400,00
3	Kab. Lampung Tengah	10.496.000,00	15.876.700,00	26.372.700,00
4	Kab. Lampung Utara	-	2.584.500,00	2.584.500,00
5	Kab. Lampung Timur	-	2.584.500,00	2.584.500,00
6	Kab. Tanggamus	240.579.200,00	9.230.600,00	249.809.800,00
7	Kab. Tulang Bawang	28.794.200,00	2.584.500,00	31.378.700,00
8	Kab. Way Kanan	7.596.400,00	2.584.500,00	10.180.900,00
9	Kota Bandar Lampung	-	2.584.500,00	2.584.500,00
10	Kota Metro	-	2.584.500,00	2.584.500,00
11	Kab. Pasawaran	34.606.000,00	2.584.500,00	37.190.500,00
12	Kab. Pringsewu	-	2.584.500,00	2.584.500,00
13	Kab. Mesuji	-	2.584.500,00	2.584.500,00
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-	2.584.500,00	2.584.500,00
15	Bagian Provinsi	90.486.000,00	16.799.800,00	107.285.800,00
	Provinsi DKI Jakarta	-	-	-
	Provinsi Jawa Barat	513.424.900,00	29.423.871.500,00	29.937.296.400,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Bandung	-	470.781.900,00	470.781.900,00
2	Kab. Bekasi	-	470.781.900,00	470.781.900,00
3	Kab. Bogor	176.570.300,00	11.748.967.000,00	11.925.537.300,00
4	Kab. Ciamis	-	470.781.900,00	470.781.900,00
5	Kab. Cianjur	50.741.700,00	474.621.900,00	525.363.600,00
6	Kab. Cirebon	-	470.781.900,00	470.781.900,00
7	Kab. Garut	40.311.500,00	476.157.900,00	516.469.400,00
8	Kab. Indramayu	-	470.781.900,00	470.781.900,00
9	Kab. Karawang	-	470.781.900,00	470.781.900,00
10	Kab. Kuningan	-	470.781.900,00	470.781.900,00
11	Kab. Majalengka	-	470.781.900,00	470.781.900,00
12	Kab. Purwakarta	1.664.000,00	470.781.900,00	472.445.900,00
13	Kab. Subang	-	470.781.900,00	470.781.900,00
14	Kab. Sukabumi	108.058.500,00	476.157.900,00	584.216.400,00
15	Kab. Sumedang	-	470.781.900,00	470.781.900,00
16	Kab. Tasikmalaya	6.043.500,00	476.772.300,00	482.815.800,00
17	Kota Bandung	-	470.781.900,00	470.781.900,00
18	Kota Bekasi	-	470.781.900,00	470.781.900,00
19	Kota Bogor	-	470.781.900,00	470.781.900,00
20	Kota Cirebon	-	470.781.900,00	470.781.900,00
21	Kota Depok	-	470.781.900,00	470.781.900,00
22	Kota Sukabumi	-	470.781.900,00	470.781.900,00
23	Kota Cimahi	-	470.781.900,00	470.781.900,00
24	Kota Tasikmalaya	-	470.781.900,00	470.781.900,00
25	Kota Banjar	-	470.781.900,00	470.781.900,00
26	Kab. Bandung Barat	27.350.400,00	470.781.900,00	498.132.300,00
27	Bagian Provinsi	102.685.000,00	5.884.774.600,00	5.987.459.600,00
	Provinsi Banten	161.412.500,00	149.649.900,00	311.062.400,00
1	Kab. Lebak	126.557.200,00	59.860.100,00	186.417.300,00
2	Kab. Pandeglang	2.572.800,00	8.551.400,00	11.124.200,00
3	Kab. Serang	-	8.551.400,00	8.551.400,00
4	Kab. Tangerang	-	8.551.400,00	8.551.400,00
5	Kota Cilegon	-	8.551.400,00	8.551.400,00
6	Kota Tangerang	-	8.551.400,00	8.551.400,00
7	Kota Serang	-	8.551.400,00	8.551.400,00
8	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	-	8.551.400,00	8.551.400,00
9	Bagian Provinsi	32.282.500,00	29.930.000,00	62.212.500,00
	Provinsi Jawa Tengah	141.570.400,00	155.095.400,00	296.665.800,00
1	Kab. Banjarnegara	1.583.300,00	1.824.600,00	3.407.900,00
2	Kab. Banyumas	6.124.400,00	1.824.600,00	7.949.000,00
3	Kab. Batang	-	1.824.600,00	1.824.600,00
4	Kab. Blora	-	1.824.600,00	1.824.600,00
5	Kab. Boyolali	-	1.824.600,00	1.824.600,00
6	Kab. Brebes	-	1.824.600,00	1.824.600,00
7	Kab. Cilacap	13.784.200,00	7.298.700,00	21.082.900,00
8	Kab. Demak	-	1.824.600,00	1.824.600,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Kab. Grobogan	-	1.824.600,00	1.824.600,00
10	Kab. Jepara	-	1.824.600,00	1.824.600,00
11	Kab. Karanganyar	-	1.824.600,00	1.824.600,00
12	Kab. Kebumen	3.287.000,00	1.824.600,00	5.111.600,00
13	Kab. Kendal	-	1.824.600,00	1.824.600,00
14	Kab. Klaten	-	1.824.600,00	1.824.600,00
15	Kab. Kudus	-	1.824.600,00	1.824.600,00
16	Kab. Magelang	-	1.824.600,00	1.824.600,00
17	Kab. Pati	-	1.824.600,00	1.824.600,00
18	Kab. Pekalongan	10.786.500,00	1.824.600,00	12.611.100,00
19	Kab. Pemasang	-	1.824.600,00	1.824.600,00
20	Kab. Purbalingga	-	1.824.600,00	1.824.600,00
21	Kab. Purworejo	36.356.800,00	56.565.300,00	92.922.100,00
22	Kab. Rembang	-	1.824.600,00	1.824.600,00
23	Kab. Semarang	-	1.824.600,00	1.824.600,00
24	Kab. Sragen	-	1.824.600,00	1.824.600,00
25	Kab. Sukoharjo	-	1.824.600,00	1.824.600,00
26	Kab. Tegal	-	1.824.600,00	1.824.600,00
27	Kab. Temanggung	-	1.824.600,00	1.824.600,00
28	Kab. Wonogiri	41.334.100,00	1.824.600,00	43.158.700,00
29	Kab. Wonosobo	-	1.824.600,00	1.824.600,00
30	Kota Magelang	-	1.824.600,00	1.824.600,00
31	Kota Pekalongan	-	1.824.600,00	1.824.600,00
32	Kota Salatiga	-	1.824.600,00	1.824.600,00
33	Kota Semarang	-	1.824.600,00	1.824.600,00
34	Kota Surakarta	-	1.824.600,00	1.824.600,00
35	Kota Tegal	-	1.824.600,00	1.824.600,00
36	Bagian Provinsi	28.314.100,00	31.019.600,00	59.333.700,00
	Provinsi Di Yogyakarta	21.703.100,00	-	21.703.100,00
1	Kab. Bantul	-	-	-
2	Kab. Gunung Kidul	-	-	-
3	Kab. Kulon Progo	17.362.500,00	-	17.362.500,00
4	Kab. Sleman	-	-	-
5	Kota Yogyakarta	-	-	-
6	Bagian Provinsi	4.340.600,00	-	4.340.600,00
	Provinsi Jawa Timur	320.053.400,00	660.091.700,00	980.145.100,00
1	Kab. Bangkalan	-	7.136.100,00	7.136.100,00
2	Kab. Banyuwangi	427.500,00	63.801.500,00	64.229.000,00
3	Kab. Blitar	-	7.136.100,00	7.136.100,00
4	Kab. Bojonegoro	-	7.136.100,00	7.136.100,00
5	Kab. Bondowoso	-	7.136.100,00	7.136.100,00
6	Kab. Gresik	-	7.136.100,00	7.136.100,00
7	Kab. Jember	57.871.200,00	7.136.100,00	65.007.300,00
8	Kab. Jombang	16.321.100,00	95.403.300,00	111.724.400,00
9	Kab. Kediri	-	7.136.100,00	7.136.100,00
10	Kab. Lamongan	-	7.136.100,00	7.136.100,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Kab. Lumajang	8.070.400,00	62.011.200,00	70.081.600,00
12	Kab. Madiun	20.877.100,00	7.136.100,00	28.013.200,00
13	Kab. Magetan	-	7.136.100,00	7.136.100,00
14	Kab. Malang	-	7.136.100,00	7.136.100,00
15	Kab. Mojokerto	-	7.136.100,00	7.136.100,00
16	Kab. Nganjuk	-	7.136.100,00	7.136.100,00
17	Kab. Ngawi	-	7.136.100,00	7.136.100,00
18	Kab. Pacitan	18.739.200,00	7.136.100,00	25.875.300,00
19	Kab. Pamekasan	-	7.136.100,00	7.136.100,00
20	Kab. Pasuruan	23.436.100,00	60.259.900,00	83.696.000,00
21	Kab. Ponorogo	18.850.500,00	7.136.100,00	25.986.600,00
22	Kab. Probolinggo	-	7.136.100,00	7.136.100,00
23	Kab. Sampang	-	7.136.100,00	7.136.100,00
24	Kab. Sidoarjo	-	7.136.100,00	7.136.100,00
25	Kab. Situbondo	-	7.136.100,00	7.136.100,00
26	Kab. Sumenep	-	7.136.100,00	7.136.100,00
27	Kab. Trenggalek	91.449.600,00	11.105.800,00	102.555.400,00
28	Kab. Tuban	-	7.136.100,00	7.136.100,00
29	Kab. Tulungagung	-	7.136.100,00	7.136.100,00
30	Kota Blitar	-	7.136.100,00	7.136.100,00
31	Kota Kediri	-	7.136.100,00	7.136.100,00
32	Kota Madiun	-	7.136.100,00	7.136.100,00
33	Kota Malang	-	7.136.100,00	7.136.100,00
34	Kota Mojokerto	-	7.136.100,00	7.136.100,00
35	Kota Pasuruan	-	7.136.100,00	7.136.100,00
36	Kota Probolinggo	-	7.136.100,00	7.136.100,00
37	Kota Surabaya	-	7.136.100,00	7.136.100,00
38	Kota Batu	-	7.136.100,00	7.136.100,00
39	Bagian Provinsi	64.010.700,00	132.018.700,00	196.029.400,00
	Provinsi Kalimantan Barat	7.672.829.600,00	22.289.800.800,00	29.962.630.400,00
1	Kab. Bengkayang	215.232.500,00	757.842.900,00	973.075.400,00
2	Kab. Landak	98.193.200,00	685.840.000,00	784.033.200,00
3	Kab. Kapuas Hulu	1.835.895.100,00	1.793.521.500,00	3.629.416.600,00
4	Kab. Ketapang	1.658.612.000,00	7.331.928.800,00	8.990.540.800,00
5	Kab. Pontianak	3.840.000,00	685.840.000,00	689.680.000,00
6	Kab. Sambas	225.881.700,00	757.842.900,00	983.724.600,00
7	Kab. Sanggau	1.495.288.800,00	1.018.144.400,00	2.513.433.200,00
8	Kab. Sintang	294.518.400,00	685.840.000,00	980.358.400,00
9	Kota Pontianak	-	685.840.000,00	685.840.000,00
10	Kota Singkawang	13.444.000,00	685.840.000,00	699.284.000,00
11	Kab. Sekadau	58.224.600,00	685.840.000,00	744.064.600,00
12	Kab. Melawi	83.840.000,00	685.840.000,00	769.680.000,00
13	Kab. Kayong Utara	12.735.300,00	685.840.000,00	698.575.300,00
14	Kab. Kubu Raya	142.558.000,00	685.840.000,00	828.398.000,00
15	Bagian Provinsi	1.534.566.000,00	4.457.960.300,00	5.992.526.300,00
	Provinsi Kalimantan Tengah	8.974.130.300,00	102.048.746.300,00	111.022.876.600,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Barito Selatan	887.577.600,00	5.355.324.300,00	6.242.901.900,00
2	Kab. Barito Utara	1.155.684.400,00	4.986.097.200,00	6.141.781.600,00
3	Kab. Kapuas	219.401.200,00	3.878.415.700,00	4.097.816.900,00
4	Kab. Kotawaringin Barat	34.764.100,00	3.372.574.500,00	3.407.338.600,00
5	Kab. Kotawaringin Timur	104.285.200,00	4.801.483.600,00	4.905.768.800,00
6	Kota Palangkaraya	31.764.000,00	3.272.883.200,00	3.304.647.200,00
7	Kab. Barito Timur	1.019.389.500,00	5.724.551.500,00	6.743.941.000,00
8	Kab. Murung Raya	2.758.092.800,00	31.175.285.400,00	33.933.378.200,00
9	Kab. Pulang Pisau	2.928.000,00	3.139.961.400,00	3.142.889.400,00
10	Kab. Gunung Mas	435.233.000,00	3.139.961.400,00	3.575.194.400,00
11	Kab. Lamandau	89.629.400,00	3.139.961.400,00	3.229.590.800,00
12	Kab. Sukamara	-	3.139.961.400,00	3.139.961.400,00
13	Kab. Katingan	353.726.200,00	3.372.574.500,00	3.726.300.700,00
14	Kab. Seruyan	86.828.800,00	3.139.961.400,00	3.226.790.200,00
15	Bagian Provinsi	1.794.826.100,00	20.409.749.400,00	22.204.575.500,00
	Provinsi Kalimantan Selatan	8.261.577.700,00	1.731.435.793.400,00	1.739.697.371.100,00
1	Kab. Banjar	693.851.800,00	144.225.925.600,00	144.919.777.400,00
2	Kab. Barito Kuala	-	57.714.526.400,00	57.714.526.400,00
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	298.432.400,00	60.850.437.400,00	61.148.869.800,00
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	86.092.800,00	57.714.526.400,00	57.800.619.200,00
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	57.714.526.400,00	57.714.526.400,00
6	Kab. Kota Baru	1.695.162.700,00	136.120.828.400,00	137.815.991.100,00
7	Kab. Tabalong	649.015.600,00	185.891.899.400,00	186.540.915.000,00
8	Kab. Tanah Laut	780.592.000,00	129.258.760.500,00	130.039.352.500,00
9	Kab. Tapin	428.905.400,00	80.773.395.600,00	81.202.301.000,00
10	Kota Banjar Baru	184.332.800,00	57.714.526.400,00	57.898.859.200,00
11	Kota Banjarmasin	-	57.714.526.400,00	57.714.526.400,00
12	Kab. Balangan	374.222.900,00	184.344.547.200,00	184.718.770.100,00
13	Kab. Tanah Bumbu	1.418.653.700,00	175.110.208.500,00	176.528.862.200,00
14	Bagian Provinsi	1.652.315.600,00	346.287.158.800,00	347.939.474.400,00
	Provinsi Kalimantan Timur	18.198.842.900,00	2.885.033.893.300,00	2.903.232.736.200,00
1	Kab. Berau	1.244.396.600,00	169.192.105.400,00	170.436.502.000,00
2	Kab. Bulungan	407.165.100,00	88.770.273.600,00	89.177.438.700,00
3	Kab. Kutai Kartanegara	4.799.037.100,00	270.229.863.900,00	275.028.901.000,00
4	Kab. Kutai Barat	2.986.291.200,00	206.425.921.300,00	209.412.212.500,00
5	Kab. Kutai Timur	2.517.440.200,00	568.550.430.700,00	571.067.870.900,00
6	Kab. Malinau	269.024.000,00	89.877.955.100,00	90.146.979.100,00
7	Kab. Nunukan	554.306.800,00	88.770.273.600,00	89.324.580.400,00
8	Kab. Paser	908.633.200,00	228.527.945.300,00	229.436.578.500,00
9	Kota Balikpapan	-	88.770.273.600,00	88.770.273.600,00
10	Kota Bontang	19.846.400,00	88.770.273.600,00	88.790.120.000,00
11	Kota Samarinda	284.620.500,00	120.417.317.900,00	120.701.938.400,00
12	Kota Tarakan	-	88.770.273.600,00	88.770.273.600,00
13	Kab. Penajam Paser Utara	429.583.600,00	89.656.418.800,00	90.086.002.400,00
14	Kab. Tana Tidung	138.729.600,00	121.297.788.100,00	121.436.517.700,00
15	Bagian Provinsi	3.639.768.600,00	577.006.778.800,00	580.646.547.400,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Provinsi Sulawesi Utara	1.721.985.500,00	2.955.970.800,00	4.677.956.300,00
1	Kab. Bolaang Mongondow	13.139.200,00	84.456.300,00	97.595.500,00
2	Kab. Minahasa	-	84.456.300,00	84.456.300,00
3	Kab. Sangihe	-	84.456.300,00	84.456.300,00
4	Kota Bitung	8.212.500,00	84.456.300,00	92.668.800,00
5	Kota Manado	286.700,00	84.456.300,00	84.743.000,00
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	84.456.300,00	84.456.300,00
7	Kab. Minahasa Selatan	-	84.456.300,00	84.456.300,00
8	Kota Tomohon	-	84.456.300,00	84.456.300,00
9	Kab. Minahasa Utara	92.948.000,00	84.456.300,00	177.404.300,00
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	84.456.300,00	84.456.300,00
11	Kota Kotamobagu	-	84.456.300,00	84.456.300,00
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	9.891.200,00	84.456.300,00	94.347.500,00
13	Kab. Minahasa Tenggara	82.099.500,00	84.456.300,00	166.555.800,00
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1.145.411.300,00	1.182.388.400,00	2.327.799.700,00
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	25.600.000,00	84.456.300,00	110.056.300,00
16	Bagian Provinsi	344.397.100,00	591.194.200,00	935.591.300,00
	Provinsi Gorontalo	384.139.800,00	-	384.139.800,00
1	Kab. Boalemo	3.136.000,00	-	3.136.000,00
2	Kab. Gorontalo	65.054.300,00	-	65.054.300,00
3	Kota Gorontalo	-	-	-
4	Kab. Pohuwato	25.564.800,00	-	25.564.800,00
5	Kab. Bone Bolango	167.806.400,00	-	167.806.400,00
6	Kab. Gorontalo Utara	45.750.400,00	-	45.750.400,00
7	Bagian Provinsi	76.827.900,00	-	76.827.900,00
	Provinsi Sulawesi Tengah	3.060.582.000,00	4.383.830.400,00	7.444.412.400,00
1	Kab. Banggai	320.490.400,00	370.794.400,00	691.284.800,00
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	175.353.200,00	175.353.200,00
3	Kab. Buol	355.850.500,00	175.353.200,00	531.203.700,00
4	Kab. Toli-Toli	54.499.200,00	175.353.200,00	229.852.400,00
5	Kab. Donggala	48.355.200,00	175.353.200,00	223.708.400,00
6	Kab. Morowali	907.542.400,00	1.558.091.100,00	2.465.633.500,00
7	Kab. Poso	87.563.200,00	175.353.200,00	262.916.400,00
8	Kota Palu	51.495.300,00	175.353.200,00	226.848.500,00
9	Kab. Parigi Moutong	101.341.400,00	175.353.200,00	276.694.600,00
10	Kab. Tojo Una Una	521.328.000,00	175.353.200,00	696.681.200,00
11	Kab. Sigi	-	175.353.200,00	175.353.200,00
12	Bagian Provinsi	612.116.400,00	876.766.100,00	1.488.882.500,00
	Provinsi Sulawesi Selatan	2.476.710.100,00	44.783.560.500,00	47.260.270.600,00
1	Kab. Bantaeng	-	778.844.500,00	778.844.500,00
2	Kab. Barru	3.958.000,00	778.844.500,00	782.802.500,00
3	Kab. Bone	46.787.300,00	778.844.500,00	825.631.800,00
4	Kab. Bulukumba	-	778.844.500,00	778.844.500,00
5	Kab. Enrekang	24.782.000,00	778.844.500,00	803.626.500,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Kab. G o w a	-	778.844.500,00	778.844.500,00
7	Kab. Jeneponto	5.740.800,00	778.844.500,00	784.585.300,00
8	Kab. Luwu	307.328.600,00	778.844.500,00	1.086.173.100,00
9	Kab. Luwu Utara	223.977.600,00	778.844.500,00	1.002.822.100,00
10	Kab. M a r o s	20.561.200,00	778.844.500,00	799.405.700,00
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	22.055.600,00	778.844.500,00	800.900.100,00
12	Kab. Pinrang	-	778.844.500,00	778.844.500,00
13	Kab. Selayar	-	778.844.500,00	778.844.500,00
14	Kab. Sidenreng Rappang	85.152.000,00	778.844.500,00	863.996.500,00
15	Kab. Sinjai	13.833.600,00	778.844.500,00	792.678.100,00
16	Kab. Soppeng	-	778.844.500,00	778.844.500,00
17	Kab. Takalar	14.805.900,00	778.844.500,00	793.650.400,00
18	Kab. Tana Toraja	-	778.844.500,00	778.844.500,00
19	Kab. Wajo	5.958.400,00	778.844.500,00	784.802.900,00
20	Kota Pare-pare	-	778.844.500,00	778.844.500,00
21	Kota Makassar	-	778.844.500,00	778.844.500,00
22	Kota Palopo	58.035.200,00	778.844.500,00	836.879.700,00
23	Kab. Luwu Timur	1.148.391.800,00	17.913.424.700,00	19.061.816.500,00
24	Kab. Toraja Utara	-	778.844.500,00	778.844.500,00
25	Bagian Provinsi	495.342.100,00	8.956.712.300,00	9.452.054.400,00
	Provinsi Sulawesi Barat	25.520.000,00	-	25.520.000,00
1	Kab. Majene	-	-	-
2	Kab. Mamuju	20.416.000,00	-	20.416.000,00
3	Kab. Polewali Mandar	-	-	-
4	Kab. Mamasa	-	-	-
5	Kab. Mamuju Utara	-	-	-
6	Bagian Provinsi	5.104.000,00	-	5.104.000,00
	Provinsi Sulawesi Tenggara	3.537.035.100,00	39.976.953.300,00	43.513.988.400,00
1	Kab. Buton	300.219.600,00	2.850.412.300,00	3.150.631.900,00
2	Kab. Konawe	1.473.520.300,00	1.695.540.800,00	3.169.061.100,00
3	Kab. Kolaka	414.326.700,00	11.003.606.400,00	11.417.933.100,00
4	Kab. Muna	-	1.453.707.400,00	1.453.707.400,00
5	Kota Kendari	-	1.453.707.400,00	1.453.707.400,00
6	Kota Bau-bau	-	1.453.707.400,00	1.453.707.400,00
7	Kab. Konawe Selatan	188.091.100,00	1.453.707.400,00	1.641.798.500,00
8	Kab. Bombana	137.502.000,00	4.627.137.700,00	4.764.639.700,00
9	Kab. Wakatobi	-	1.453.707.400,00	1.453.707.400,00
10	Kab. Kolaka Utara	209.603.200,00	1.628.913.600,00	1.838.516.800,00
11	Kab. Konawe Utara	24.297.600,00	1.453.707.400,00	1.478.005.000,00
12	Kab. Buton Utara	82.067.600,00	1.453.707.400,00	1.535.775.000,00
13	Bagian Provinsi	707.407.000,00	7.995.390.700,00	8.702.797.700,00
	Provinsi Bali	-	-	-
1	Kab. Badung	-	-	-
2	Kab. Bangli	-	-	-
3	Kab. Buleleng	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Kab. Gianyar	-	-	-
5	Kab. Jembrana	-	-	-
6	Kab. Karangasem	-	-	-
7	Kab. Klungkung	-	-	-
8	Kab. Tabanan	-	-	-
9	Kota Denpasar	-	-	-
10	Bagian Provinsi	-	-	-
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.064.218.500,00	130.001.528.200,00	133.065.746.700,00
1	Kab. Bima	318.391.200,00	5.777.845.700,00	6.096.236.900,00
2	Kab. Dompu	201.865.600,00	5.777.845.700,00	5.979.711.300,00
3	Kab. Lombok Barat	5.440.000,00	5.777.845.700,00	5.783.285.700,00
4	Kab. Lombok Tengah	9.878.400,00	5.777.845.700,00	5.787.724.100,00
5	Kab. Lombok Timur	-	5.777.845.700,00	5.777.845.700,00
6	Kab. Sumbawa	886.134.400,00	5.777.845.700,00	6.663.980.100,00
7	Kota Mataram	-	5.777.845.700,00	5.777.845.700,00
8	Kota Bima	32.000.000,00	5.777.845.700,00	5.809.845.700,00
9	Kab. Sumbawa Barat	997.665.200,00	52.000.611.300,00	52.998.276.500,00
10	Kab. Lombok Utara	-	5.777.845.700,00	5.777.845.700,00
11	Bagian Provinsi	612.843.700,00	26.000.305.600,00	26.613.149.300,00
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	216.208.200,00	454.995.200,00	671.203.400,00
1	Kab. Alor	2.640.000,00	9.099.900,00	11.739.900,00
2	Kab. Belu	39.735.000,00	112.838.800,00	152.573.800,00
3	Kab. Ende	-	9.099.900,00	9.099.900,00
4	Kab. Flores Timur	-	9.099.900,00	9.099.900,00
5	Kab. Kupang	-	9.099.900,00	9.099.900,00
6	Kab. Lembata	-	9.099.900,00	9.099.900,00
7	Kab. Manggarai	27.137.900,00	78.259.200,00	105.397.100,00
8	Kab. Ngada	-	9.099.900,00	9.099.900,00
9	Kab. Sikka	-	9.099.900,00	9.099.900,00
10	Kab. Sumba Barat	-	9.099.900,00	9.099.900,00
11	Kab. Sumba Timur	-	9.099.900,00	9.099.900,00
12	Kab. Timor Tengah Selatan	3.008.000,00	9.099.900,00	12.107.900,00
13	Kab. Timor Tengah Utara	-	9.099.900,00	9.099.900,00
14	Kota Kupang	-	9.099.900,00	9.099.900,00
15	Kab. Rote Ndao	-	9.099.900,00	9.099.900,00
16	Kab. Manggarai Barat	19.696.300,00	9.099.900,00	28.796.200,00
17	Kab. Nagekeo	-	9.099.900,00	9.099.900,00
18	Kab. Sumba Barat Daya	-	9.099.900,00	9.099.900,00
19	Kab. Sumba Tengah	-	9.099.900,00	9.099.900,00
20	Kab. Manggarai Timur	80.749.400,00	9.099.900,00	89.849.300,00
21	Kab. Sabu Raijua	-	9.099.900,00	9.099.900,00
22	Bagian Provinsi	43.241.600,00	90.999.100,00	134.240.700,00
	Provinsi Maluku	93.238.800,00	-	93.238.800,00
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	20.925.900,00	-	20.925.900,00
2	Kab. Maluku Tengah	2.798.800,00	-	2.798.800,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Kab. Maluku Tenggara	3.040.000,00	-	3.040.000,00
4	Kab. Pulau Buru	-	-	-
5	Kota Ambon	-	-	-
6	Kab. Seram Bagian Barat	40.592.300,00	-	40.592.300,00
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-
8	Kab. Kepulauan Aru	-	-	-
9	Kota Tual	-	-	-
10	Kab. Maluku Barat Daya	7.234.000,00	-	7.234.000,00
11	Kab. Buru Selatan	-	-	-
12	Bagian Provinsi	18.647.800,00	-	18.647.800,00
	Provinsi Maluku Utara	2.610.155.600,00	58.918.023.900,00	61.528.179.500,00
1	Kab. Halmahera Tengah	313.244.900,00	3.309.297.000,00	3.622.541.900,00
2	Kab. Halmahera Barat	15.795.200,00	2.945.901.200,00	2.961.696.400,00
3	Kota Ternate	-	2.945.901.200,00	2.945.901.200,00
4	Kab. Halmahera Timur	926.536.600,00	15.310.691.000,00	16.237.227.600,00
5	Kota Tidore Kepulauan	-	2.945.901.200,00	2.945.901.200,00
6	Kab. Kepulauan Sula	102.400.000,00	2.945.901.200,00	3.048.301.200,00
7	Kab. Halmahera Selatan	86.899.800,00	2.945.901.200,00	3.032.801.000,00
8	Kab. Halmahera Utara	643.248.000,00	10.839.023.900,00	11.482.271.900,00
9	Kab. Pulau Morotai	-	2.945.901.200,00	2.945.901.200,00
10	Bagian Provinsi	522.031.100,00	11.783.604.800,00	12.305.635.900,00
	Provinsi Papua	4.333.996.100,00	887.991.311.000,00	892.325.307.100,00
1	Kab. Biak Numfor	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00
2	Kab. Jayapura	50.276.600,00	12.685.590.100,00	12.735.866.700,00
3	Kab. Jayawijaya	111.039.000,00	12.685.590.100,00	12.796.629.100,00
4	Kab. Merauke	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00
5	Kab. Mimika	663.160.100,00	355.196.525.500,00	355.859.685.600,00
6	Kab. Nabire	590.178.800,00	12.685.590.100,00	13.275.768.900,00
7	Kab. Paniai	666.732.800,00	12.685.590.100,00	13.352.322.900,00
8	Kab. Puncak Jaya	122.358.400,00	12.685.590.100,00	12.807.948.500,00
9	Kab. Yapen Waropen	7.995.200,00	12.685.590.100,00	12.693.585.300,00
10	Kota Jayapura	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00
11	Kab. Sarmi	553.516.800,00	12.685.590.100,00	13.239.106.900,00
12	Kab. Keerom	314.720.000,00	12.685.590.100,00	13.000.310.100,00
13	Kab. Yahukimo	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00
14	Kab. Pegunungan Bintang	96.800.000,00	12.685.590.100,00	12.782.390.100,00
15	Kab. Tolikara	183.123.200,00	12.685.590.100,00	12.868.713.300,00
16	Kab. Boven Digoel	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00
17	Kab. Mappi	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00
18	Kab. Asmat	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00
19	Kab. Waropen	107.296.000,00	12.685.590.100,00	12.792.886.100,00
20	Kab. Supiori	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00
21	Kab. Mamberamo Raya	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00
23	Kab. Yalimo	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00
24	Kab. Lanny Jaya	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	Kab. Nduga	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00
26	Kab. Puncak	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00
27	Kab. Dogiyai	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00
28	Kab. Intan Jaya	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00
29	Kab. Deiyai	-	12.685.590.100,00	12.685.590.100,00
30	Bagian Provinsi	866.799.200,00	177.598.262.700,00	178.465.061.900,00
	Provinsi Papua Barat	667.984.700,00	7.206.602.800,00	7.874.587.500,00
1	Kab. Sorong	79.539.800,00	288.264.100,00	367.803.900,00
2	Kab. Manokwari	29.040.000,00	288.264.100,00	317.304.100,00
3	Kab. Fak Fak	-	288.264.100,00	288.264.100,00
4	Kota Sorong	-	288.264.100,00	288.264.100,00
5	Kab. Sorong Selatan	19.072.000,00	288.264.100,00	307.336.100,00
6	Kab. Raja Ampat	72.547.200,00	2.882.641.200,00	2.955.188.400,00
7	Kab. Teluk Bintuni	12.300.800,00	288.264.100,00	300.564.900,00
8	Kab. Teluk Wondama	-	288.264.100,00	288.264.100,00
9	Kab. Kaimana	321.888.000,00	288.264.100,00	610.152.100,00
10	Kab. Maybrat	-	288.264.100,00	288.264.100,00
11	Kab. Tambora	-	288.264.100,00	288.264.100,00
12	Bagian Provinsi	133.596.900,00	1.441.320.600,00	1.574.917.500,00
	JUMLAH	94.066.885.900,00	6.491.229.778.400,00	6.585.296.664.300,00

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Departemen

Antonius Suharto

NIP 060041107

